



LAPORAN KINERJA DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA TRIWULAN III 2025



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 3 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKj triwulanan sebagai salah satu pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan APBN 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan penetapan kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKj ini dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Penyusunan LKj ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya di tahun selanjutnya. Demikian, semoga dokumen LKj triwulan 3 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, 18 Oktober 2025

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Sumberdaya Manusia.....	5
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 DJPB	10
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025	11
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2. Analisis Capaian Kinerja	14
SS 1. Meningkatkan Produksi Perikanan Budi Daya yang berkelanjutan	14
SS 2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	17
3.2. Efisiensi	20
3.3. Kinerja Anggaran	20
BAB IV. PENUTUP.....	23
Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

1. Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan 3 Tahun 2025	14
2. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	18
3. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan 3 Tahun 2025 dan 2024	21
4. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan 3 Tahun 2024 dan 2025	21

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya	4
2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja	5
3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan	6
4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	12
5. Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025	13
6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan 2 Tahun 2025	22

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini, bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan suatu media informasi pertanggungjawaban terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pada dasarnya akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah kepada publik merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintahan untuk menjelaskan (*obligation to answer*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada Pimpinan. Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut telah mengadopsi indikator kinerja utama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penyusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya.

Capaian kinerja triwulan 3 tahun 2025 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebanyak 98,45%. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang menyelenggarakan pembangunan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan perikanan budi daya yang berkelanjutan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Renstra DJPB) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DJPB, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dapat di revisi sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2025-2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama transformasi Indonesia yang menargetkan kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1 persen dengan Landasan Transformasi diantaranya : (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya diperlukan Renstra DJPB Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Renstra KKP. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budi daya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dokumen ini akan menjadi acuan pembangunan perikanan budi daya dalam lima tahun ke depan bagi pemangku kepentingan perikanan budi daya dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian/Lembaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi dan akademisi. Renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

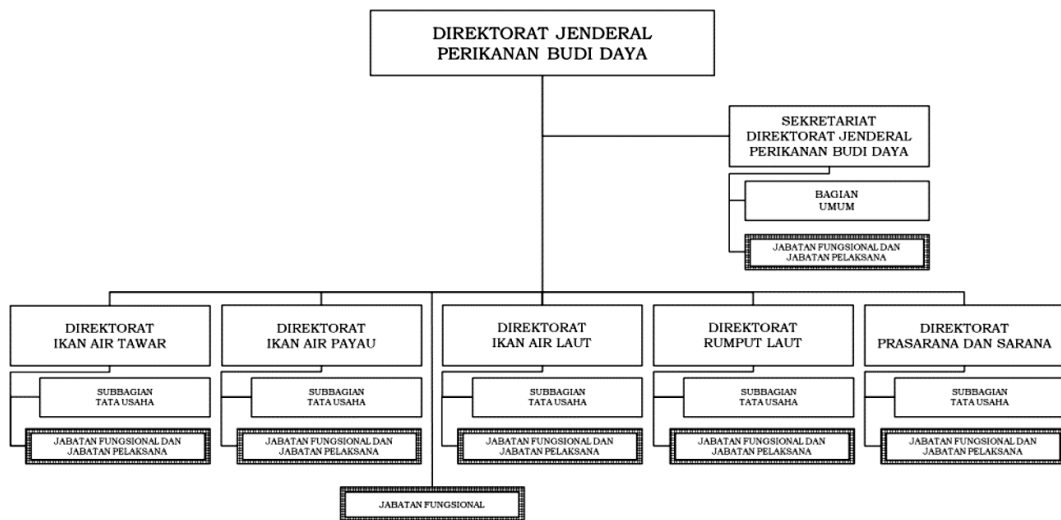
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan 3 Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DJPB selama periode triwulan 3 Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan 3 ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen Perikanan Budi daya Tahun 2025.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan Budi Daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; iv) pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; v) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; vi) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya

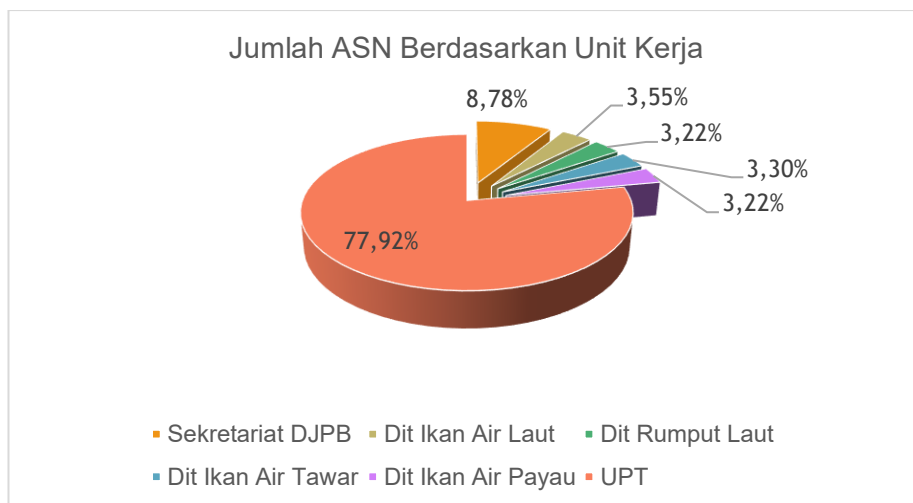
Selain itu DJPB juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara

3. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
6. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang
15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

1.4. Sumberdaya Manusia

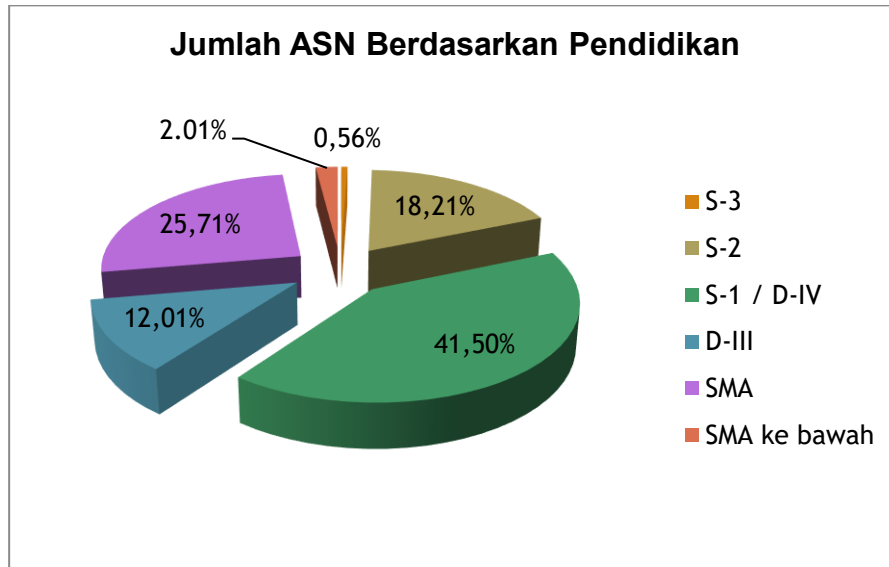
Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Triwulan 3 Tahun 2025 adalah 1.241 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 109 orang (8,78%); (ii) Direktorat Ikan Air Laut sejumlah 44 orang (3,55%); (iii) Direktorat Rumput Laut sejumlah 40 orang (3,22%); (iv) Direktorat Ikan Air Tawar sejumlah 41 orang (3,30%) (v) Direktorat Ikan Air Payau sejumlah 40 orang (3,22%); dan (vi) Unit Pelaksana Teknis sejumlah 967 Orang (77,92%).



Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S-3 sejumlah 7 orang (0,56%); (ii) S-

2 sejumlah 226 orang (18,21%); (iii) S-1/D-IV sejumlah 515 orang (41,50%); (iv) D-III sejumlah 149 orang (12,01%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 319 orang (25,71%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 25 orang (2,01%).



Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km dan luas laut mencapai 6,4 juta km². Wilayah daratannya yang kaya akan sungai, danau, waduk, serta persawahan memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan budi daya baik di air tawar, payau, maupun laut (KKP, 2024). Berdasarkan data FAO (2023), Indonesia merupakan produsen perikanan budi daya terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Produksi perikanan budi daya nasional pada tahun 2024 mencapai 24,85 juta ton, menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun selama periode 2020–2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya global yang berada di kisaran 21% per tahun, menurut proyeksi FAO (2023).

Komoditas perikanan budi daya di Indonesia sangat beragam, dengan kurang lebih 30 jenis ikan dan biota air lainnya yang dikembangkan secara komersial. Dari jumlah tersebut, 12 komoditas utama ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan perikanan budi daya, yaitu: Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*), Kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), Kakap merah (*Lutjanus sp.*), Bandeng (*Chanos chanos*), Patin (*Pangasius sp.*), Nila (*Oreochromis niloticus*), Ikan mas (*Cyprinus carpio*), Lele dumbo (*Clarias gariepinus*), Gurame (*Osphronemus goramy*), Rumput laut

(*Eucheuma sp.* , *Gracilaria sp.* , *Sargassum sp.*), Ikan hias (Arwana, Cupang, Oscar, dll.), dan Kepiting bakau (*Scylla serrata*).

Luas lahan potensial untuk pengembangan perikanan budi daya di Indonesia mencakup wilayah darat, pesisir, dan laut lepas, antara lain: Budidaya air tawar meliputi kolam tanah, kolam beton, keramba jaring apung (KJA) di waduk, danau, dan sungai, dengan total luasan mencapai lebih dari 1,5 juta hektare . Budidaya air payau : tambak tradisional dan intensif di kawasan pesisir, dengan luas potensial mencapai 2,1 juta hektare , meskipun baru sekitar 1,2 juta hektare yang dimanfaatkan secara aktif. Budidaya laut : meliputi keramba jaring apung laut (KJAL), rumput laut, mutiara, dan budidaya kepiting/lobster di laut, dengan potensi ruang laut yang dapat dialokasikan mencapai 12 juta hektare (KKP, 2024).

Selain itu, model integrasi seperti mina padi (padi-ikan) di areal persawahan menjadi alternatif pengembangan budi daya di lahan pertanian dengan sistem pertanian terpadu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2023), luas sawah di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta hektare , dengan potensi pemanfaatan sebagian untuk mina padi.

Subsektor perikanan budi daya juga memiliki kontribusi signifikan dalam perdagangan internasional. Nilai ekspor produk perikanan budi daya pada tahun 2024 mencapai USD 5,2 miliar , didominasi oleh udang vaname, rumput laut, dan ikan hias. Indonesia saat ini menduduki posisi kedua pengeksport ikan hias terbesar di dunia, setelah Singapura, menurut data Trademap (2023).

Dengan meningkatnya permintaan global akan produk pangan asal laut yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi biru, potensi pengembangan perikanan budi daya Indonesia masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui pendekatan inovatif, teknologi tepat guna, dan regulasi yang kondusif.

PERMASALAHAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan budidaya yang besar, masih menghadapi sejumlah kendala struktural yang menghambat pertumbuhan sektor ini. Berdasarkan data terbaru hingga 2024, berikut rangkuman tantangan beserta dampaknya:

Keterbatasan Distribusi Induk dan Benih Bermutu

Ketersediaan induk dan benih unggul (SPF) masih menjadi masalah krusial. Saat ini, 70% benih udang vanamei diimpor dari Thailand, Vietnam, dan Filipina, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 30% kebutuhan nasional(KKP, 2023). Bahkan, Broodstock Center di Bali dan Aceh yang bertujuan mengurangi ketergantungan impor baru mampu memproduksi 1 miliar benur/tahun , jauh dari target 3 miliar benur pada 2024. Keterbatasan akses benih berkualitas ini

menyebabkan petani di daerah terpencil terpaksa menggunakan benih lokal rentan penyakit, berisiko menurunkan produktivitas hingga 50% (AEPUDI, 2023).

Tingginya Biaya Pakan

Biaya pakan mendominasi 60–70% dari total biaya produksi budidaya (FAO, 2022). Ketergantungan pada impor bahan baku seperti tepung ikan dan minyak nabati menyebabkan nilai impor pakan mencapai USD 1,2 miliar/tahun (BPS, 2023). Akibatnya, banyak petani kecil beralih ke pakan murah dengan kualitas rendah (Rp 8.000–10.000/kg), yang mengandung protein di bawah standar. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ikan/udang tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran air akibat limbah pakan (BRIN, 2023).

Daya Cerna Nutrisi Tidak Optimal

Efisiensi pakan di tambak tradisional masih rendah, dengan rata-rata FCR (rasio konversi pakan) mencapai 2,5–3,0, jauh lebih tinggi dibandingkan sistem modern (1,2–1,5) (LIPI, 2023). Ketidakefisienan ini menyebabkan pemborosan pakan hingga Rp 2,5 triliun/tahun dan peningkatan limbah organik yang merusak kualitas air (KKP, 2022).

Serangan Hama dan Penyakit

Penyakit seperti *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) menyebabkan 30–40% produksi udang gagal panen setiap tahun (AEPUDI, 2023). Di Jawa Timur, 20% tambak udang terinfeksi EHP pada 2023, mengakibatkan kerugian hingga Rp 500 miliar (Dinas Perikanan Jatim, 2023). Sistem biosekuriti yang lemah dan perubahan iklim semakin memperparah risiko penyebaran penyakit.

Pencemaran Lingkungan

80% limbah tambak (pakan sisa, kotoran ikan) tidak dikelola, menyebabkan peningkatan kadar amonia hingga 1,5–2,0 mg/liter (melebihi ambang aman) dan sedimentasi di pesisir (KLHK, 2023). Penggunaan antibiotik dan pestisida berlebihan juga memicu resistensi mikroba, mengancam kelestarian ekosistem akuatik.

Perubahan Parameter Lingkungan

Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu air laut rata-rata 0,5–1,0°C dalam 10 tahun terakhir, memicu stres pada udang dan menurunkan imunitas (BMKG, 2023). Di Aceh, 25% tambak gagal panen akibat fluktuasi salinitas pasca-tsunami (Universitas Syiah Kuala, 2023). Kondisi ini diperparah oleh pencemaran dari aktivitas industri di sekitar kawasan tambak.

Lemahnya Pengendalian Tata Ruang

Alih fungsi lahan tambak yang tidak terkendali menyebabkan 1,5 juta hektare lahan tumpang tindih dengan kawasan mangrove atau permukiman (KLHK, 2023). Konversi

mangrove menjadi tambak telah merusak 2,5 juta hektare hutan bakau sejak 1980-an, menghilangkan fungsi ekosistem sebagai penyangga alami (Kementerian LHK, 2022).

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Budi Daya triwulan 3 Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama kurun waktu Juli-September 2025.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 – 2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta evaluasi dan analisis kinerja selama triwulan 3 Tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 DJPB

VISI

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 3 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Misi Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

“Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Misi Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”

TUJUAN

Tujuan pembangunan perikanan budi daya tahun 2025 – 2029 meliputi :

1. Meningkatnya produktivitas sektor perikanan budi daya
2. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai suatu hasil dan dampak (outcome) dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis (SS) DJPB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SS 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan

SS 2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja :

1. Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton) 6,75 di 2025 dan 8,52 di 2029
2. Volume Produksi Rumput Laut (Juta Ton) 11,64 di 2025 dan 14,14 di 2029

Sasaran Strategis ke-dua (SS-2). Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengelolaan Perikanan Budi Daya dengan Indikator Kinerja :

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) 86 di 2025 dan 88 di 2029;

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
 Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
 Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Sakti Wahyu Trenggono



Tb. Haeru Rahayu

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya secara Berkelanjutan	1. Volume Produksi Ikan Air Tawar (juta ton)	3,92
	2. Volume Produksi Ikan Air Payau (juta ton)	2,54
	3. Volume Produksi Ikan Air Laut (juta ton)	0,29
	4. Volume Produksi Rumpun Laut (juta ton)	11,64
2. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	5. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
1. Pengelolaan Budi Daya Rumpun Laut	22.989.000.000
2. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	42.513.598.000
3. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	435.414.864.000
4. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	80.697.259.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen	
1. Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	356.225.133.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	937.839.654.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Sakti Wahyu Trenggono



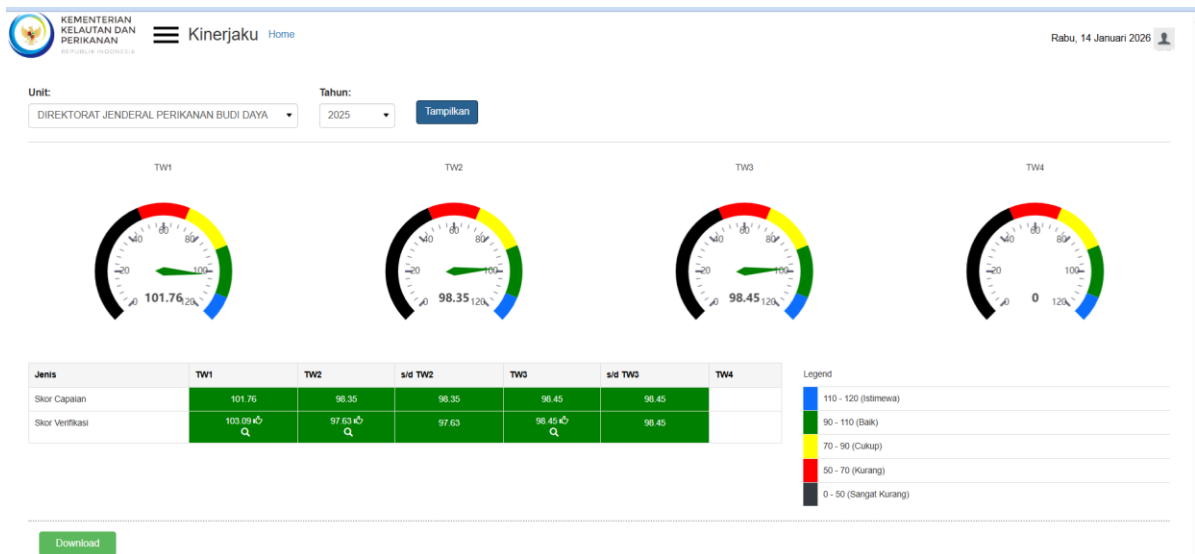
Tb. Haeru Rahayu

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi "Kinerjaku", berikut capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada triwulan 3 Tahun 2025



Gambar 5. Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan Budi Daya pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh empat Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat empat indikator yang dapat diukur capaiannya pada triwulan dua sedangkan satu indikator lainnya diukur tahunan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Triwulan 3 Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan 3 Tahun 2025

	IINDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW.3	REALISASI	%
1	Volume produksi ikan air tawar (juta ton)	3,92	2,99	2,91	97,32
2	Volume produksi ikan air payau (juta ton)	2,54	1,93	1,87	96,89
3	Volume prouksi Ikan air laut (juta ton)	0,29	0,22	0,23	104,55
4	Volume produksi rumput laut	11,64	8,63	8,20	95,02
5	Nilai Implementasi refomasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	86	0	0	0

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya yang berkelanjutan

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya produksi Perikanan Budi Daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja :

IK 1. Volume Produksi Budidaya air Tawar

SS 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan							
IKU 7 : Volume Produksi Budidaya Air Tawar (juta Ekor)							
2024		2025				% Pertumbuhan TW 3 Tahun 2024-TW 3 Tahun 2025	
R		T		R	% thd target Thn		
TW 3	Tahun 2024	Tahunan	Tw 3	TW 3			
2,89	3,94	3,92	2,99	2,91	74,23	97,32	10,87

Budidaya air tawar di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan upaya peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam sektor perikanan. Pada tahun 2025, subsektor perikanan budi daya ikan air tawar mencapai produksi triwulan III sebesar 2.916.018 ton dengan capaian terhadap target sebesar 97,14% dibandingkan dengan target pada triwulan III tahun 2025 sebesar 2.999.798 ton, dengan komoditas unggulan seperti ikan nila, lele, gurame, dan patin menjadi kontributor utama. Ketidak tercapaian produksi ikan air tawar disebabkan karena berkurangnya lahan budi daya ikan air tawar terutama di wilayah perairan umum daratan (PUD), dengan dibatasinya budi daya menggunakan jaring apung yang ada di waduk atau danau, sehingga produksi ikan air tawar tidak mencapai target. Namun Ditjen Perikanan Budidaya telah memberikan stimulus dalam Upaya pencapaian produksi dengan program-program bantuan ikan air tawar seperti mesin pakan dan bahan baku pakan untuk meningkatkan margin penjualan, memberikan bimbingan teknis dalam menerapkan teknologi pembenihan dan pakan yang lebih efisien. Selain itu, pendampingan kepada para pembudidaya juga semakin diperkuat, dengan dukungan akses pasar dan penyuluhan teknik budidaya yang ramah lingkungan. Hasilnya, produksi budidaya ikan air tawar berhasil mencapai angka yang mencerminkan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah pedesaan.

IK 2. Volume Produksi Budidaya Air Payau

SS 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan							
IKU 2 : Volume produksi budidaya air payau (juta Ekor)							
2024		2025				% Pertumbuhan TW 3 Tahun 2024-TW 3 Tahun 2025	
R		T		R	% thd target Thn		
TW 3	Tahun 2024	Tahunan	Tw 3	TW 3			
2,53	3,41	2,54	1,93	1,87	73,62	96,89	-19,87

Budidaya air payau, yang mencakup komoditas seperti udang vaname, bandeng, dan kepiting, mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Produksi budidaya ikan air payau pada triwulan III tahun 2025 sebesar 1.870.226 dengan target sebesar 1.928.154 sehingga capaiannya terhadap target sebesar 96,71 %. Teknologi budidaya yang terus disempurnakan telah meningkatkan

produktivitas dan kualitas hasil panen. Salah satu capaian penting adalah peningkatan efisiensi penggunaan lahan dan pengelolaan lingkungan yang ramah, seperti penerapan sistem yang efektif dan efisien pada budidaya udang. Dengan implementasi tersebut, produksi udang vaname dan bandeng semakin melimpah, mengarah pada peningkatan ekspor dan kontribusi pada devisa negara. Selain itu, keberlanjutan ekosistem dan pengelolaan kualitas air yang baik memastikan bahwa budidaya air payau semakin berdaya saing, dengan potensi pasar yang terus berkembang baik domestik maupun internasional.

IK 3. Volume Produksi Budidaya Air Laut

SS 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan									
IKU 2 : Volume produksi budidaya air laut (juta Ekor)									
2024		2025				% thd target Thn		% thd target trwln	% Pertumbuhan TW 3 Tahun 2024-TW 3 Tahun 2025
R		T		R					
TW 3	Tahun 2024	Tahunan	Tw 3	TW 3					
0,03	0,06	0,29	0,22	0,23	79,39	104,54	25,28		

Produksi budidaya laut Indonesia, yang mencakup berbagai komoditas seperti ikan kerapu, ikan kakap, dan kekerangan, terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin populernya teknologi budidaya berbasis sistem terbuka maupun semi-tertutup. Salah satu keberhasilan besar di sektor ini adalah peningkatan produksi kerapu dan kakap yang diproduksi secara berkelanjutan, di mana beberapa daerah pesisir berhasil menjadi pusat pembenihan dan pengolahan hasil budidaya laut. Pada triwulan III tahun 2025 produksi sebesar 229.374 ton dengan target sebesar 225.953 ton sehingga capaiannya sebesar 104,92 %. Dengan dukungan riset dan pengembangan serta kemitraan dengan pihak swasta, sektor ini berhasil memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor, khususnya untuk produk-produk laut yang memiliki nilai jual tinggi. Pengelolaan yang baik dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan telah memastikan bahwa budidaya laut semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi yang ramah lingkungan dan menguntungkan bagi nelayan serta pembudidaya

IK 4. Capaian Produksi Rumput Laut

SS 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan									
IKU 2 : Volume produksi rumput laut (juta ton)									
2024		2025				% thd target Thn		% thd target trwln	% Pertumbuhan TW 3 Tahun 2024-TW 3 Tahun 2025
R		T		R					
TW 3	Tahun 2024	Tahunan	Tw 3	TW 3					
6,23	8,21	11,64	8,63	8,20	70,44	95,02	24,39		

Budidaya rumput laut, khususnya untuk komoditas seperti *Eucheuma cottonii* dan *Gracilaria*, telah mencapai kemajuan signifikan di Indonesia dengan capaian produksi pada triwulan III tahun 2025 sebesar 8.200.196 ton dengan target produksi 8.634.877 ton, tercapai sebesar 94,97 %, Tahun ini produksi rumput laut Indonesia cukup baik, baik dari segi volume maupun kualitas. Peningkatan kapasitas produksi ini didorong oleh teknologi budidaya yang lebih efisien, serta peningkatan kapasitas pembenihan dan pemrosesan rumput laut. Beberapa daerah pesisir seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur menjadi pusat produksi rumput laut yang mendunia, dengan banyaknya industri pengolahan rumput laut yang menghasilkan produk bernilai tinggi seperti agar-agar, carrageenan, dan bahan baku kosmetik. Selain itu, rumput laut juga mulai dijadikan sebagai produk unggulan untuk mendukung perekonomian lokal, terutama di daerah pesisir, dan menjadi komoditas ekspor utama ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Namun secara target produksi rumput laut belum mencapai target dikarenakan ketidakstabilan harga jual rumput laut sehingga memicu petani terkadang berhenti sesaat sambil menunggu harga jual tinggi sehingga volume produksi rumput tidak maksimal produksinya. Ditjen perikanan budidaya sudah melakukan kegiatan guna pencapaian produksi tersebut dengan membuat bibit kultur jaringan yang dapat dibenihkan dengan cepat dan masif

SS 2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis ke-dua (SS-2). Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengelolaan Perikanan Budi Daya dengan Indikator Kinerja :

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) 86 di 2025 dan 88 di 2029;

IK 1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) DJPB

Definisi Indikator Kinerja

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Nilai kinerja RB KKP merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP yang dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Roadmap* RB, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan KepmenKP 166 Tahun 2023 tentang *Roadmap* RB KKP 2020-2024. Komponen RB K/L dibagi menjadi 2 dimensi yaitu dimensi RB general dan RB tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi,
2. Komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator dan

Capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 indikator

Sedangkan dimensi RB tematik (bobot 10) terdiri atas komponen capaian RB tematik (bobot 10), diukur dengan 5 indikator yaitu Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting. Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan berdasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- b. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Analisa Capaian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. Target Indek RB Tahun 2025 ditargetkan 86 dengan capaiannya bersifat tahunan sehingga belum terdapat capaian di Triwulan 3 Tahun 2025.

Meskipun Indek RB Tahun 20245 bersifat tahunan, sehingga belum terdapat capaian di Triwulan 3 Tahun 2025. Saat ini KKP tengah menunggu penetapan grand design reformasi birokrasi nasional dan roadmap reformasi birokrasi nasional 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan Roadmap RB KKP Tahun 2025 – 2029. Pada tanggal 27 Februari 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah mengirimkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 409/SJ.3/OT.730/II/2025, hal Penyampaian Nilai RB Sementara dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Menindaklanjuti nota dinas tersebut, telah dilaksanakan rapat penyusunan rencana aksi RB General dan RB Tematik. Konsep rencana aksi tersebut telah dievaluasi oleh Tim Evaluator Internal dan Pada tanggal 25 Maret 2025, telah dikeluarkan surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor : B.96/ITJ/HP.450/III/2025, hal Hasil Evaluasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor B.81/ITJ.4/KP.440/III/2025, tanggal 13 Maret 2025, Evaluator Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan evaluasi penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025. Tujuan evaluasi untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan rencana aksi RB General dan Tematik tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan dan memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Ruang lingkup evaluasi meliputi Rencana Aksi General dan Tematik Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:

-
- a. Sebagai wujud komitmen dalam penyelenggaraan RB di lingkungan KKP yang berdampak kepada stakeholder, Pimpinan pada unit kerja Eselon I di lingkungan KKP telah menetapkan nilai RB KKP sebagai Indikator Kinerja Utama.
 - b. Terdapat target rencana aksi yang memerlukan penyesuaian kembali, disebabkan target yang ditetapkan lebih rendah dari baseline hasil penilaian Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Rencana Aksi (Upaya) Peningkatan Capaian Kedepan

Berkoordinasi secara tertulis dengan seluruh Penanggung Jawab RB untuk memperbaiki rencana aksi perihal penetapan target rencana aksi dengan nilai sama dengan atau lebih tinggi dari hasil penilaian RB Tahun 2024; penyesuaian rencana anggaran dengan besaran pada RKA-KL sebelum efisiensi; penyesuaian indikator yang berorientasi outcome/dapat terukur; dan penyesuaian kegiatan dengan fokus intervensi pada SOP, SDM, dan Pengawasan, Teknologi dan Inovasi pada RB Tematik.

Menyusun Rancangan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Ditjen Perikanan Budi Daya.

3.2. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran DJPB belum bisa dilakukan penghitungan dikarenakan data realisasi keuangan pada aplikasi SMART kementerian keuangan belum tersedia.

3.3. Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran APBN 2025 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.357.409.654.000,- akan tetapi muncul kebijakan Efisiensi Anggaran sehingga alokasi anggaran yang efektif digunakan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp965.974.981.000,-. Berdasarkan data alokasi anggaran efektif dari *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan triwulan 3 tahun 2025, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp373.788.727.321,- (27,54%) dari alokasi anggaran awal atau (38,69%)

dari alokasi anggaran efektif, menurun secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2024 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 17,32%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya triwulan 3 tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan 3 Tahun 2025 dan 2024

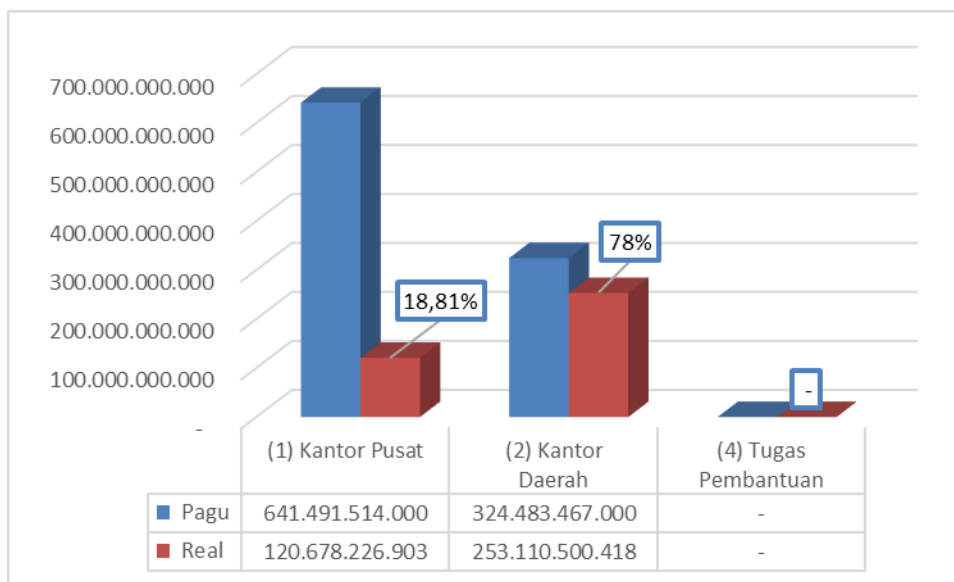
TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
2024	1.230.450.223.000,-	689.282.398.884,-	56,02
2025	965.974.981.000,-	373.788.727.321,-	38,69

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp199.815.291.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp356.566.029.000,-; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp409.593.661.000,-.

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan 3 Tahun 2024 dan 2025

JENIS BELANJA	TW II TAHUN 2024			TW II TAHUN 2025*		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	196.492.186.000	137.744.082.651	70,01	199.815.291.000	160.181.656.921	80,16
Barang	726.356.984.000	502.478.095.116	69,18	356.566.029.000	190.506.720.192	53,43
Modal	307.601.053.000	49.060.221.117	15,95	409.593.661.000	23.100.350.208	5,64
Total	1.230.450.223.000	689.282.398.884	56,02	965.974.981.000	373.788.727.321	38,69

Persentase realisasi anggaran belanja Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Pegawai, sementara untuk persentase realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal menurun bila dibandingkan tahun 2024.



Gambar 6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan 3 Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker Kantor Daerah (78,00%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Tugas Pembantuan Provinsi (0%) sebagaimana berikut

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 18,81 %, dengan adanya aturan satu DIPA maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 78,00%, dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang 63,39% dan terendah pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 47,07%

3. Satker Tugas Pembantuan Provinsi

Realisasi anggaran pada satker Tugas Pembantuan Provinsi keseluruhan sebesar 0%, hal ini disebabkan masih adanya blokir anggaran serta penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada seluruh satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

BAB IV. PENUTUP

Kendala dalam pencapaian Iku Produksi perikanan Budi Daya adalah keterlambatan pengiriman data produksi dari kabupaten/kota;

Upaya yang akan dilakukan adalah : melakukan perbaikan metodologi pengumpulan data sehingga data dapat dikumpulkan dengan lebih cepat dan akurat, penambahan jumlah enumerator dan pemberian honor pada enumerator;



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
KONSTITUSI

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

